

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung, 2004.

Anang Mury Kurniawan, *Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*, edisi 1, CV.

Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (Kajian Awal Grand Desain Pembangunan Hukum Nasional)*, cetakan pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2019.

Darussalam, Danny Septiadi dan B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing - Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*, cetakan 1, Danny Darussalam Tax Centre, Jakarta, 2013.

Darussalam, Danny Septiadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*, cetakan 1, Danny Darussalam Tax Centre, Jakarta, 2008.

Go Shui Fa, *Transfer Pricing Circular No. 59 Article 12, Tax Administration Rules and Procedure for Transaction between Associates Enterprises*, 1998.

Gunadi, *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen, dan Pajak*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994.

Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi, *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*, cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor,

2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Jurnal

Andy Ardianto, Dyna Rachmawati, *Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol. 14 no. 2, Juni 2018.

Antonius Leonard Tarigan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia*, Medan, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.

Ayu Ida Sentanu, Budi Ispriyarso, Henny Juliani, *Analisis Yuridis terhadap Transfer Pricing sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*, Diponegoro Law Review, vol. 5 no. 2, 2016.

Dinartika Hukamawati, Arifah Fibri Andriani, *Analisis Penerapan Arm's Length Principle pada Transaksi Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Merk Dagang (Trademark) kepada Perusahaan Afiliasi*, diakses dari <http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/34/24> pada tanggal 11 Mei 2020.

Dwi Noviasatika, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo, *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap*

Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan Perusahaan Asing, Jurnal Perpajakan (JEJAK), vol. 8 no. 1, 2016.

Ernst and Young, *Transfer Pricing Global Reference Guide* (2005) Ernst and Young (www.ey.com/transferpricingreferenceguide).

Go Shui Fa, *Tax Administration Rules and Procedure for Transaction between Associates Enterprises, Transfer Pricing Circular No. 59 Article 12, 1998.*

Hadi Setiawan, *Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara*, diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer%20pricing%20dan%20risikonya%20terhadap%20penerimaan%20negara.pdf pada tanggal 7 Mei 2020.

Ivan Hardiyanto, *Permasalahan Transfer Pricing dalam Undang-Undang Pajak di Indonesia*, diakses dari <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/1859/1485> pada tanggal 18 Mei 2020.

Muhamad Rafik, *Urgensitas Hukum atas Transfer Pricing dalam Transaksi Impor di Indonesia*, Jakarta, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan, *Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak*, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, vol. 6 no. 2, 2018.

Radhi Abdul Halim Rachmat, *Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing*,
Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, vol. 7 no. 1, Januari-Juni, 2019.

Rolando Ritonga, *Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penerimaan Negara (Studi Kasus Transfer Pricing Asian Agri dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak di Indonesia)*, Jakarta, Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2020 tentang Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.





UNIVERSITAS *Narotama*
FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :ANY PALAUD
2. NIM :12119025
3. Judul Skripsi /Tesis :Kedudukan Hukum Atas Penerapan Transfer Pricing Oleh Wajib Pajak Badan Di Indonesia.

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 30 Januari 2021

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda ,S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.
Dekan.